



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2020**

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dapat tersusun, sebagai bahan pertanggungjawaban akuntabilitas pencapaian *outcome*, program, kegiatan dan anggaran Tahun 2019 sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *outcome* maupun *ouput* yang berkelanjutan.

LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Penetaan Kinerja Tahun 2020 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta



Suharini Eliawati
NIP 196810011995032005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.2.1. Kedudukan	2
1.2.2. Tugas	2
1.2.3. Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Sistematika Penyajian	7
II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	10
2.1. Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022	10
2.2. Misi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022	10
2.3. Urusan	11
2.4. Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta	13
2.4.1. Visi	14
2.4.2. Misi	14
2.4.3. Tujuan	14
2.4.4. Sasaran	14
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020	18
2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2020	19
2.7. Rencana Anggaran Tahun 2020	20
2.8. Instrumen Pendukung	21
III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020	23
3.1. Capaian Kinerja	23
3.2. Analisis Capaian Kinerja :	24
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 1 (Persentase Ketersediaan Pangan)	24
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 2 (Skor Pola Pangan Harapan)	27
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 3 (Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi)	27
3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 4 (Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran)	27

3.3.	Realisasi Anggaran	39
IV	Penutup	41
4.1.	Kesimpulan	41
4.2.	Rencana Tindak Lanjut	41

Lampiran:

1. Capaian IKU RPJMD 2020
2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
2.1	Program Urusan Pangan	12
2.2	Program Urusan Pertanian	12
2.3	Program Urusan Kelautan dan Perikanan	12
2.4	Program Bersama Penunjang Organisasi	12
2.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2017-2022	15
2.6	Indikator Kinerja Utama 2019	19
2.7	Penetapan Kinerja Tahun 2019	19
2.8	Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	20
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2020	24
3.3	Rincian indikator kinerja tentang ketersediaan pangan	25
3.4	Ketersediaan Pangan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	26
3.5	Ketersediaan Pangan dan Konsumsi Penduduk DKI Jakarta Tahun 2019 Dengan Asumsi Penduduk Sebesar 10.576.400	28
3.6	Perbandingan capaian Indikator Kinerja 2019 dan 2020	30
3.7	Situasi Konsumsi Pangan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (berdasarkan AKE 2100 Kkal/kap/hr, AKP 57 gr/kap/hr)	33
3.8	Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (AKE 2100 Kkal/kap/hr, AKP 57 gr/kap/hr)	33
3.9	Pembandingan skor PPH sasaran di tahun 2015 dengan skor PPH aktual ditahun bersangkutan	34
3.10	Capaian Indikator Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitas	38
3.11	Realisasi Anggaran Tahun 2020	39
3.12	Realisasi anggaran belanja langsung per program	39

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mengemban 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yaitu :

- 1) Persentase ketersediaan pangan
- 2) Skor Pola Pangan Harapan
- 3) Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi

Dari 2 Indikator tersebut, semua sudah mencapai target. Rincian pencapaian IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase ketersediaan pangan, dengan capaian kinerja 100% (sangat baik)
- 2) Skor Pola Pangan Harapan, dengan capaian kinerja 88,2 (sangat baik)
- 3) Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi, dengan capaian kinerja 143,2 (sangat baik)

Sampai dengan 31 Desember 2020, realisasi anggaran total APBD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 mencapai Rp215.083.011.212 (89,66%) dari anggaran Rp241.007.369.632 penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp115.869.693.279 (89,36%) dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp129.660.002.929 dan penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp100.213.317.933 (90,00%) dari anggaran belanja langsung sebesar Rp111.347.366.703.

Memperhatikan capaian dan permasalahan yang dihadapi, dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di DKI Jakarta diarahkan pada berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kapasitas ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Pembangunan sektor ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan sistem perekonomian DKI Jakarta.

Terdapat berbagai tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terutama karena berkedudukan di ibukota negara, tantangan ke depan adalah mengendalikan ketersediaan bahan pangan baik produksi pertanian dan hortikultura, peternakan, maupun kelautan dan perikanan, berupa produk dasar maupun produk olahan. Selain ketersediaan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan mutu dan keamanan pangan yang beredar dalam Kota Jakarta.

Dalam urusan lingkungan hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tantangan berupa pelestarian sumber daya kelautan secara berkesinambungan.

Sedangkan peluang di sektor kelautan dan perikanan dimana luas laut 6.997,5 km² jauh lebih luas dibandingkan dengan luas daratan 661,52 km² perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas pembangunan Jakarta. Potensi kelautan dan perikanan yang ada sekarang perlu ditransformasi dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Tantangan dan peluang di atas tentu harus direspon dengan baik dengan mengimplementasikan berbagai macam strategi, program dan kegiatan.

Pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan secara sinergis harus dilakukan. Kondisi ini dapat diciptakan antara lain melalui pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan dengan penataan kelembagaan, perbaikan mekanisme kerja organisasi, penataan sumber daya aparatur, dan peningkatan kompetensi aparatur dengan pelimpahan tugas dan wewenang yang lebih spesifik. Penataan kelembagaan telah dilakukan pada awal Januari 2017 ini yaitu dengan restrukturisasi organisasi pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1.2.1. Kedudukan

Pelaksanaan tugas organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan.

1.2.2. Tugas

Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

1.2.3. Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DKPKP;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pembangunan pengembangan dan pembinaan kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pengendalian kesehatan hewan, ikan dan tanaman;
- f. perlindungan sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pengembangan teknologi kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, ikan dan tanaman;
- i. pemantauan dan pengendalian distribusi, ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- j. pengelolaan sistem informasi rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. fasilitasi pemasaran hasil rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pembinaan tenaga fungsional rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- m. fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. penyelenggaraan standarisasi di bidang kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- o. konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil;

- p. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- q. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- s. pengawasan dan pengendalian izin di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- t. pelaksanaan pengawasan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- v. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang DKPKP;
- w. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DKPKP;
- x. pengelolaan kearsipan, data dan informasi DKPKP; dan
- y. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, susunan lengkapnya sebagai berikut:

A. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 4. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Kelautan, terdiri dari :
1. Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;
 2. Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari :
1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Pertanian, terdiri dari :
1. Seksi Pertanian Perkotaan;
 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; dan
 3. Seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
1. Seksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan

B. Suku Dinas lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Susunan Organisasi Suku Dinas Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari:

1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 4. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Seksi Perikanan;
 6. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- b. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari:
1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 4. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Seksi Kelautan dan Perikanan;
 6. Subkelompok Jabatan Fungsional
- c. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Seksi Pertanian.
 3. Seksi Kehutanan.
 4. Seksi Ketahanan Pangan.
 5. Sub Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Seksi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Susunan Organisasi UPT Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.
 1. Kepala Pusat
 2. Sub Bagian Tata Usaha.

3. Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman
 4. Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman.
 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- b. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.
1. Kepala Pusat
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian
 4. Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian.
 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.
1. Kepala Unit
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
 4. Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan.
 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- d. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
1. Kepala Pusat
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran
 4. Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.
 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- e. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
1. Kepala Pusat
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Subbagian Keuangan
 4. Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan
 5. Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner
 6. Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan
 7. Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan
 8. Satuan Pengawas Internal
 9. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- f. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
 - 1. Kepala Pusat
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Satuan Pelaksana Budidaya Laut
 - 4. Satuan Pelaksana Konservasi Laut.
 - 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2020. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2020 meliputi RPJMD 2017-2022, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2017-2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menjelaskan capaian kinerja organisasi selama tahun 2020 beserta analisisnya dan realisasi anggaran Tahun 2020.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Mekanisme penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian melalui metode pengumpulan data dari tiap UKPD, pengukuran kinerja dari data yang dikirimkan, verifikasi capaian kinerja dari tiap data indikator kinerja utama yang sesuai dengan sasaran strategis organisasi untuk memperoleh keandalan informasi, serta penelaahan analisis tiap-tiap sasaran strategis yang ditampilkan dalam laporan kinerja ini oleh pejabat pada masing-masing sektor yang terkait. Sedangkan penanggungjawab pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas berada pada Sekretaris Dinas, khususnya di Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022;
- 2) Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022;
- 3) Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2020.

2.1. Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017–2022 adalah: ” **Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua** ”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
2. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang maju, lestari dan berbudaya.
3. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.
4. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka mewujudkan keberadaban, keadilan dan sejahtera bagi semua.

2.2. Misi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan DKI Jakarta 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan keberagaman.

2.3. Urusan

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada selama tahun 2018 merujuk pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Undang Undang tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan :

1. Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar, yaitu :
 Urusan Pangan
2. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu :
 Urusan Pertanian
 Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan pengelompokan urusan tersebut, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

1. Urusan Pangan

Tabel 2.1 Program Urusan Pangan

No.	Program	Penanggungjawab
P1-1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketahanan Pangan

2. Urusan Pertanian

Tabel 2.2 Program Urusan Pertanian

No.	Program	Penanggungjawab
P2-1.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.3 Program Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program	Penanggungjawab
P3-1.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Kelautan, Perikanan
P3-2.	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kelautan

4. Program Bersama Penunjang Organisasi

Tabel 2.4 Program Bersama Penunjang Organisasi

No.	Program	Penanggungjawab
P4-1.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	Sekretariat
P4-2.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	Sekretariat
P4-3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	Sekretariat
P4-4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	Sekretariat
P4-5.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan	Sekretariat

No.	Program	Penanggungjawab
P4-6.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan	Sekretariat

2.4. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022

2.4.1. Visi

Dalam pembangunan ketahanan pangan, Kelautan dan Pertanian, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya (dalam arti luas) tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, visi pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah:

”TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAN LAUT BIRU YANG BERKELANJUTAN MENUJU JAKARTA MAJU, LESTARI DAN BERBUDAYA UNTUK KEBERADAPAN, Keadilan dan Kesejahteraan bagi semua”

Visi tersebut mengandung tiga unsur yang mewakili tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, yaitu: (1) Jakarta dengan sistem ketahanan pangan yang baik, (2) Jakarta dengan laut biru dan pemanfaatannya yang lestari.

Jakarta dengan ketahanan pangan yang baik berarti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menargetkan terciptanya ketahanan dan keamanan pangan dalam hal ketersediaan, mutu, distribusi, dan akses oleh semua penduduk Jakarta sehingga penduduk Jakarta menjadi sejahtera secara pangan. Bidang-bidang yang berperan dalam pencapaian ini adalah Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Bidang Perikanan.

Jakarta Laut Biru berarti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta akan terus menjaga dan meningkatkan perbaikan ekosistem laut yang berkelanjutan di Teluk Jakarta beserta pulau-pulau kecil dan pantai pesisirnya. Bidang-bidang yang terkait dengan visi ini adalah Bidang Kelautan dan Bidang Perikanan.

2.4.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menetapkan 9 (sembilan) misi Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan, dan daya saing usaha pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

2.4.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan, distribusi , konsumsi dan keamanan/kualitas pangan
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil perikanan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi produk hewan dan kesehatan hewan
5. Mengembangkan potensi dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

2.4.4. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan terkendali dan terarah, maka sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketahanan pangan
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi hasil pertanian
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi hasil perikanan
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi produk hewan dan kesehatan hewan
5. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Terwujudnya kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

Tujuan dan sasaran tersebut di atas dirumuskan dan tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI
Jakarta 2017 - 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan	Terwujudnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%
			Persentase Pangan yang aman dari bahan berbahaya	95 %	95 %	95 %	96 %	96 %
			Skor Pola Pangan Harapan	81	82	83	84	85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian	Jumlah produksi benih padi		45,6	47,2	47,2	48
			Jumlah produksi tanaman produktif		36.700	36.700	37.000	37.000
			Jumlah produksi tanaman pertanian dan hortikultura		33.063	38.022	43.725	50.284
			Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian		109,4	114,68	120,04	125,27
			Jumlah lokasi agrowisata yang dikembangkan		8	10	12	14
			Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian		6	4	2	0
			Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	83				
			Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi	141				
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian, peternakan dan keswan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian, peternakan dan keswan	Jumlah produksi pertanian dan peternakan	69.229				
			Jumlah kasus penyakit menulat strategis	12				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
			Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	10				
			Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias		102.000.000.000	107.000.000.000	112.000.000.000	116.000.000.000
			Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4
			Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	4	4	4	4
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi produk hewan dan kesehatan hewan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian, peternakan dan keswan	Jumlah produksi susu		5.196.379	5.300.306	5.406.312	5.514.439
			Jumlah produksi daging		31.847.633	34.440.014	35.112.014	36.867.614
			Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan		11.000	12.000	13.000	14.000
			Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan Anthax)		11	10	9	8
			Jumlah pelayanan kesehatan hewan		9.000	9.500	10.000	21.000
4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil perikanan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian	Jumlah produksi perikanan	703,786				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
			Jumlah produksi perikanan budidaya		4.412	4.434	4.456	4.478
			Jumlah produksi perikanan tangkap		150.552	152.430	153.701	155.386
			Jumlah produksi ikan hias		20.777.303	21.335.576	21.832.231	22.324.673
			Jumlah produksi benih ikan		79.594.751	84.998.143	90.810.158	99.258.335
			Jumlah produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan		5.959	6.379	6.827,6	7.310
			Angka konsumsi ikan		37	38,5	40	41,5
			Indek kepuasan pelayanan kendaraan operasional		4	4	4	4
5.	Mengembangkan potensi dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan		78	73	68	65
			Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi		141,9	142,4	142,9	143,4

2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan 1. Persentase Ketersediaan Pangan 2. Skor Pola Pangan Harapan
2.	Terwujudnya Konservasi Laut	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi

2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah membuat penetapan kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2017- 2022 serta RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat SKPD yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam renstra tahun 2017-2022.

Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Penetapan Kinerja Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya ketahanan Pangan	1 Indeks Ketahanan Pangan (ketersediaan)	100 %

	2 Indeks Ketahanan Pangan (skor pola pangan harapan)	83
2. Terwujudnya Konservasi Laut	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	142,4 Ha

2.7 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp591.623.628.053.

Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 anggaran turun menjadi Rp241.007.369.632 dengan komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp129.660.002.929 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp111.347.366.703

2.7.1 Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Target belanja dan prosentase belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Target Belanja APBDP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp129.660.002.929	53,80%
Belanja Langsung	Rp111.347.366.703	46,20 %
Jumlah	Rp241.007.369.632	100 %

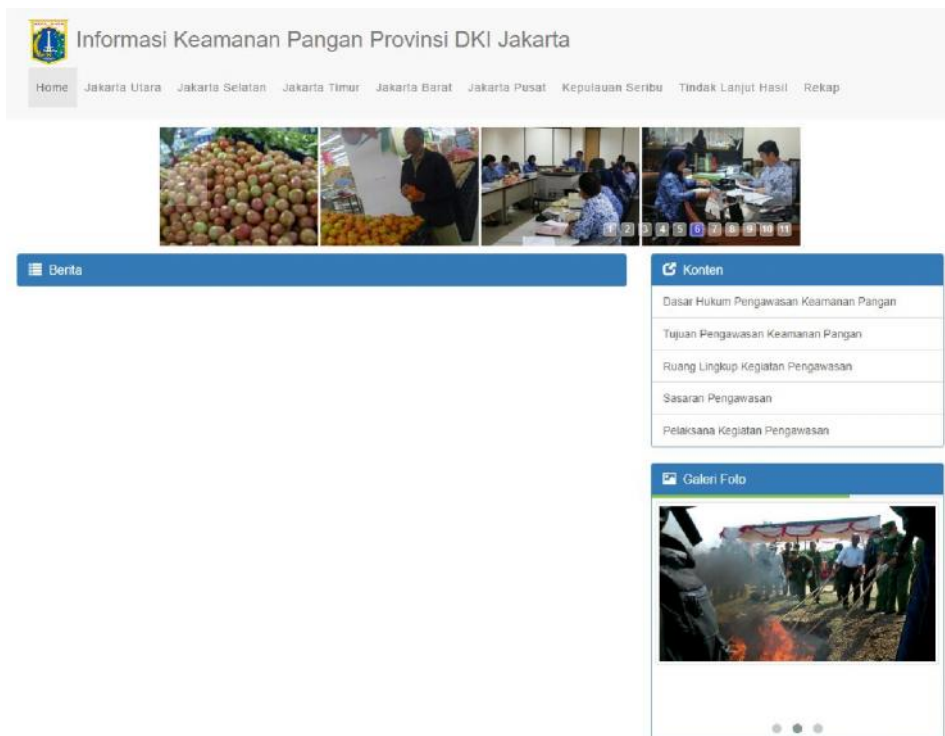
2.8 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung berupa situs yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan alamat <http://dkpkp.jakarta.go.id>

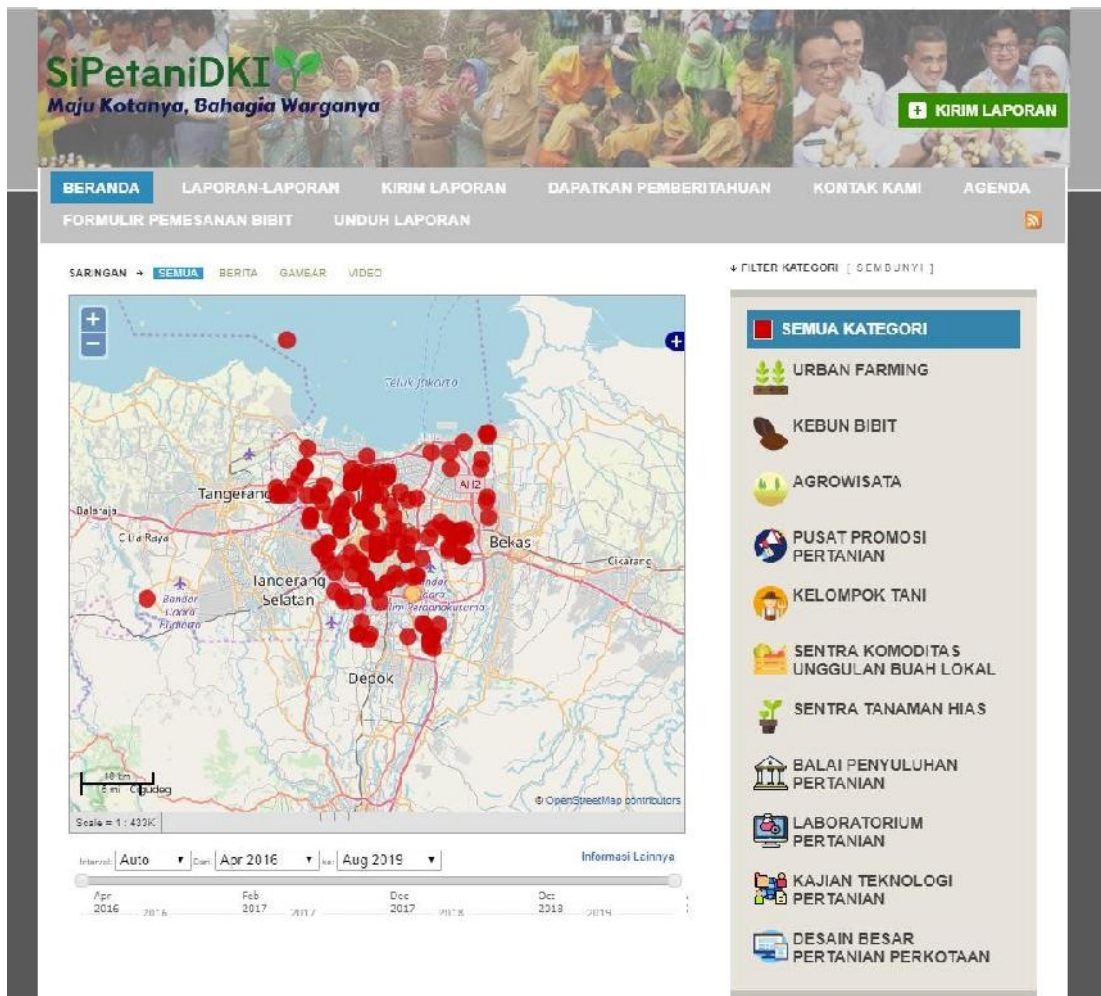


sedangkan aplikasi yang dikelola oleh Aplikasi :

1. Ketahanan Pangan Jakarta : <https://ketahananpangandki.com/>



2. Sistem Informas Petani DKI Jakarta :
<https://balkotfarm.jakarta.go.id/sipetanidki/>



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

3.1. Capaian Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 100	Sangat Baik
2.	76 90	Tinggi
3.	66 75	Sedang
4.	51 65	Rendah
5.	50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 untuk setiap penetapan kinerja sasaran program tahun 2020 dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya ketersediaan pangan	1 Persentase ketersediaan pangan	100%	100%	100
	2 skor pola pangan harapan	82	88,2	100
Terwujudnya Konservasi Laut	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang	142,4 Ha	143,687 Ha	100

Dari tabel di atas semua indikator kinerja dapat dicapai sesuai target dengan realisasi kinerja sangat baik.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 1 (Persentase Ketersediaan Pangan)

Sasaran program Terwujudnya Ketersediaan Pangan dilaksanakan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, indikator kinerja persentase ketersediaan pangan. Target pada Tahun 2019 ditetapkan persentase ketersediaan pangan 100 %, realiasi program 100 %, sehingga capaian kinerja program 100 % (sangat baik).

Indikator ketersediaan pangan yang dituangkan dalam RPJMD hanya dibatasi pada pangan strategis, yaitu pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat dan sangat mempengaruhi inflasi daerah. Tabel 2 memberikan gambaran kebutuhan pangan dari setiap kategori atau jenis pangan. Namun demikian dalam RPJMD tahun 2018-2022, ketersediaan pangan yang dijadikan target hanya pangan strategis yang meliputi beras,

daging, ikan, ayam, telur, susu, sayuran dan buah-buahan. Rincian indikator kinerja tentang ketersediaan pangan seperti tercantum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rincian indikator kinerja tentang ketersediaan pangan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD		Target capaian setiap tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan pangan	Beras	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Daging sapi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Daging ayam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Telur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Susu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sayur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Buah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Target setiap tahun 100 % menggambarkan bahwa pangan yang tersedia melebihi dari kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta. Hal ini untuk menjamin bahwa setiap penduduk DKI Jakarta dapat mengakses pangan baik dari segi fisik maupun ekonomi. Akses secara fisik artinya pangan tersedia dan terjangkau secara fisik oleh masyarakat, sementara akses secara ekonomi menggambarkan pangan tersedia secara visi dan dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Kualitas ketersediaan pangan menggambarkan kualitas pangan yang tersedia ditinjau dari sisi keragamannya. Ketersediaan energi per orang per hari tahun 2019 sebesar 3.238kcal menunjukkan bahwa ketersediaan energi Provinsi DKI Jakarta sudah berada di atas standar ketersediaan yang dianjurkan sebesar 2.400 kkal. Demikian pula ketersediaan protein tahun 2019 juga sudah melebihi standar ketersediaan yang dianjurkan sebesar 63 gram per orang per hari, yaitu sebesar 114.03 gram.

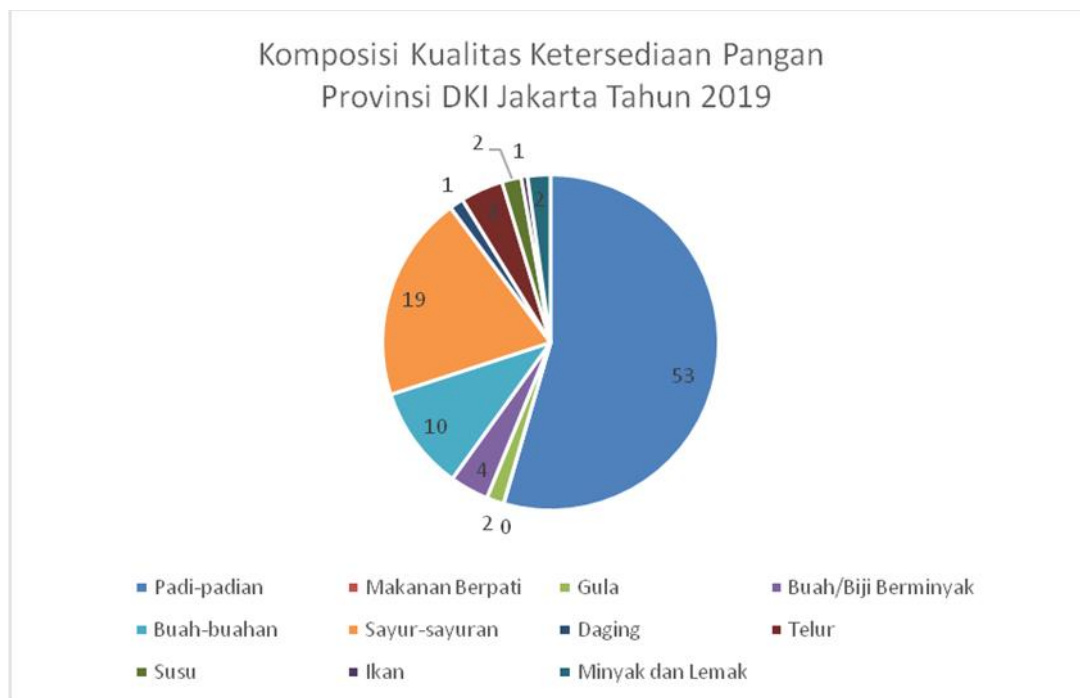
ketersediaan yang dianjurkan sebesar 63 gram per orang per hari, yaitu sebesar 295,64 gram.

Komposisi kuantitas ketersediaan pangan penduduk Provinsi DKI Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Ketersediaan Pangan Penduduk
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

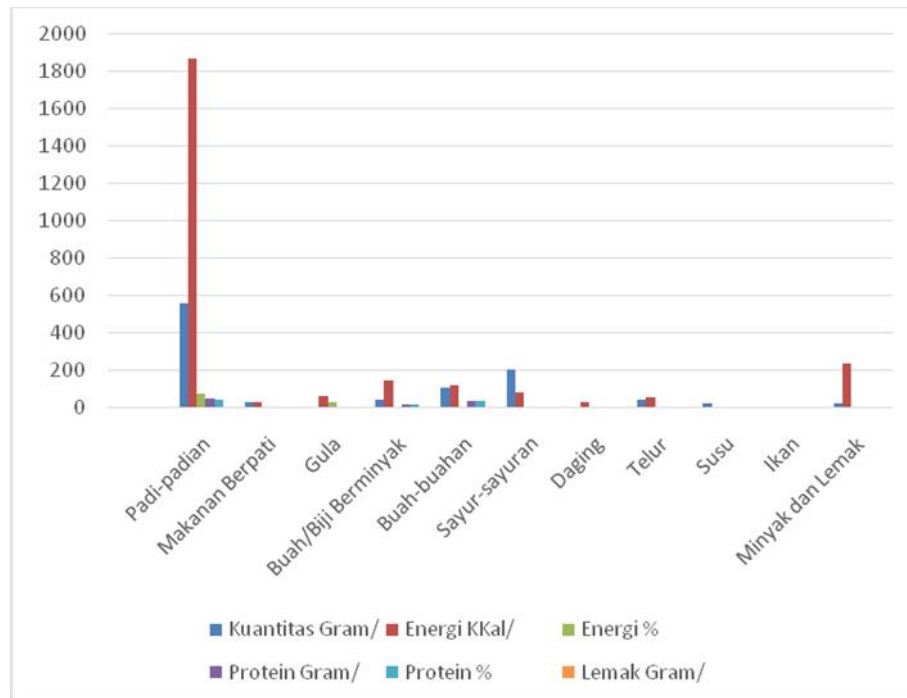
No.	Kelompok Pangan	Kuantitas	Energi		Protein		Lemak	
		Gram/ Kap/Hr	KKal/ Kap/Hr	%	Gram/ Kap/Hr	%	Gram/ Kap/Hr	%
1	Padi-padian	561	1869	70.7	45.24	41.9	12	31.0
2	Makanan Berpati	28.63	29.32	1.1	0.2	0.2	0.19	0.5
3	Gula	17.2	63	26.7	0.03	0.0	0.09	0.0
4	Buah/Biji Berminyak	38.19	144.57	5.5	14.49	13.4	6.24	16.1
5	Buah-buahan	103.32	116.1	4.4	34.55	32.0	0.36	0.9
6	Sayur-sayuran	204.03	77.83	2.9	4.65	4.3	0.52	1.3
7	Daging	13.93	30.63	1.2	2.49	2.3	2.21	5.7
8	Telur	42.49	52.77	2.0	3.59	3.3	4	10.3
9	Susu	19.29	12	0.5	0.62	0.6	0.68	1.8
10	Ikan	6.3	11.68	0.4	2.14	2.0	0.26	0.7
11	Minyak dan Lemak	22.63	236	8.9	0	0.0	12.19	31.5
Total		1,057.01	2,642.90	100	108	100	38.74	100

Sumber : Diolah, NBM Provinsi DKI Jakarta 2019



Sumber : Diolah, NBM Provinsi DKI Jakarta 2019

Gambar 3.1 Komposisi Kualitas Ketersediaan Pangan Penduduk
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (Persen)



Sumber : Diolah, NBM Provinsi DKI Jakarta 2019

Gambar 3.2 Komposisi Persentase Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (Persen)

Neraca Bahan Makanan Tahun 2018 Tetap dan 2019 Sementara sebagai berikut :

Kelompok daging merupakan pangan sumber protein hewani. Berikut data kelompok daging sebagai sumber ketersediaan energy dan protein:

Kelompok komoditas	Energi (kal/kap/hari)		Protein (gr/kap/hari)	
	2018	2019	2018	2019
Daging sapi	57	66	4.3	5.0
Daging ayam	98	95	6.9	6.9
Telur	33	34	2,6	2.7
Susu	68	71	2.7	2.8
Ikan	73	81	11.5	12.7

Ketersediaan pangan dan konsumsi penduduk DKI Jakarta cukup tinggi hal tersebut disebabkan adanya perbedaan jumlah penduduk yang cukup besar antara kondisi di malam hari dan kondisi di siang hari. Kondisi di malam hari atau penduduk yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta pLEBIH sedikit dibandingkan dengan penduduk siang hari, jumlahnya diperkirakan bertambah mencapai 2,5 juta (perkiraan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2012). Perkiraan nilai konsumsi dengan

menggunakan Susenas disusun dengan menggunakan jumlah penduduk yang ber-KTP Provinsi DKI Jakarta, sedangkan pada kenyataannya, jumlah penduduk siang yang melakukan aktivitas dan juga melakukan aktivitas konsumsi berupa makanan adalah berjumlah 12.491.788 jiwa.

Ketersediaan pangan tersebut masih berada di atas standar, sehingga dapat dinyatakan bahwa ketersediaan pangan di DKI Jakarta cukup, baik untuk siang hari maupun malam hari.

Tabel 3.5. Ketersediaan Pangan dan Konsumsi Penduduk DKI Jakarta Tahun 2019
Dengan Asumsi Penduduk Sebesar 10.576.400

Data 2019

JUMLAH PENDUDUK DKI = 10.576.400

KOMODITI	KETERSEDIAAN PANGAN			KEBUTUHAN PANGAN			SELISIH
	per hari	per Tahun	per hari	per hari	per Tahun	per hari	per hari
	(gr/kap/hr)	kg/kap/th	(ton/hr)	(gr/kap/hr)	kg/kap/th	(ton/hr)	(ton/hr)
Beras	357.62	130.53	3,782.33	258.20	94.24	2,730.83	1051.51
Ikan	85.67	31.27	906.08	64.70	23.62	684.29	221.79
Daging Sapi	175.58	64.09	1,857.00	17.80	6.50	188.26	1668.74
Daging Ayam	40.43	14.76	427.60	30.40	11.10	321.52	106.08
Telur	30.00	10.95	317.29	24.60	8.98	260.18	57.11
Gula	17.85	6.51	188.78	14.00	5.11	148.07	40.71
Susu	22.62	8.26	239.24	17.8	6.50	188.26	50.98
Sayur	195.91	71.51	2,072.02	143.6	52.41	1,518.77	553.25
Buah	134.81	49.21	1,425.80	104.6	38.18	1,106.29	319.51
Minyak Goreng	95.63	34.90	1147.56	24.6	8.98	260.18	887.38

Berdasarkan Tabel di atas, maka ketersediaan pangan telah mencapai lebih dari 100 % dibandingkan dengan kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta. Data ini menggambarkan bahwa meskipun produksi pangan di DKI Jakarta sangat minim untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta, namun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta para stakeholdernya, maka kebutuhan pangan dapat terpenuhi lebih dari 100%. Dengan demikian upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar terus ditingkatkan sehingga pasokan pangan tetap terjaga, harga stabil dan dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta.

Tabel 3.6 Perbandingan capaian Indikator Kinerja 2019 dan 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD		Capaian setiap tahun			
			2017	2018	2019	2020
Ketersediaan pangan	Beras	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Daging sapi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Daging ayam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Telur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Susu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sayur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Buah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk diantaranya meliputi:

1. Peningkatan produksi pangan di DKI Jakarta baik produk pertanian, peternakan maupun perikanan. Peningkatan produksi pertanian dilakukan dengan program *Urban Farming* atau pertanian perkotaan, peningkatan produksi peternakan dengan meningkatkan produksi susu dan peningkatan produksi perikanan dengan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
2. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah yang mengurus pangan
BUMD yang terlibat pada urusan pangan meliputi PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Ketiga BUMD inilah yang aktif melakukan usaha baik *trading* (perdagangan), kerja sama penyediaan pangan maupun mendukung program-program ketahanan pangan.
3. Kerja sama penyediaan pangan
Kerja sama penyediaan pangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah mitra dalam bentuk MoU. Adapun proses bisnisnya ditindaklanjuti oleh BUMD
4. Kebijakan Pemerintah Pusat
Kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga pasokan dan ketersediaan pangan diantaranya dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Program ini dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi termasuk BUMD. Diantara kebijakan pemerintah pusat yang terkait langsung dengan ketersediaan pangan di DKI

Jakarta adalah kuota impor pangan dan penetapan harga acuan untuk pangan strategis.

Pelaksanaan perhitungan Ketersediaan Pangan tidak menggunakan anggaran APBD

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 2 (Skor Pola Pangan Harapan)

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencakupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu suatu pangan penduduk berdasarkan skor pangan. Semakin tinggi skor pangan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) telah disepakati pada tingkat nasional berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) X tahun 2012 sebagai acuan dalam pembagunan pangan dan gizi. Angka Kecukupan Energi (AKE) di tingkat konsumsi sebesar 2.150 Kkal/kap/hari, dan 2.200 Kkal/kap/hari di tingkat ketersediaan. Sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) di tingkat konsumsi adalah sebesar 52 gram/kap/hari, dan 57 gram/kap/hari di tingkat ketersediaan (Balitwati, 2015).

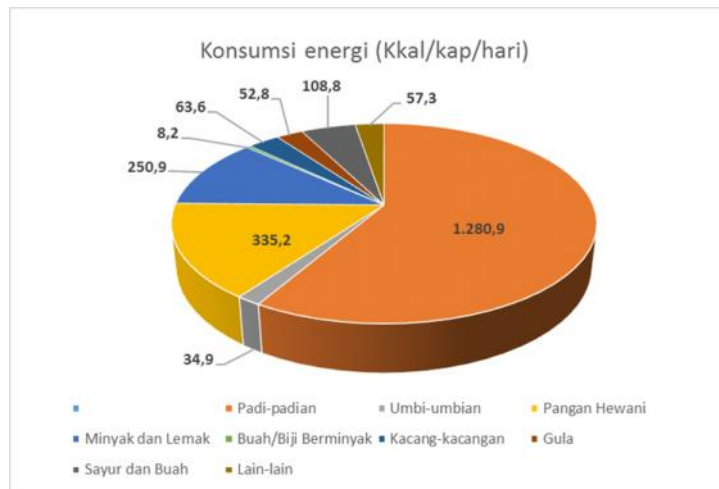
Tabel 3.6. Situasi Konsumsi Pangan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (berdasarkan AKE 2100 Kkal/kap/hr, AKP 57 gr/kap/hr)

Kelompok/Jenis Pangan	Total Wilayah			
	Kandungan Gizi		Berat Pangan	
	Energi Kkal/Hari	Protein Gram/Hari	Gram Per Hari	Kilogram Per Tahun
1. Padi-Padian				
Beras	901,9	21,5	258,2	94,2
Jagung	3,6	0,1	2,7	1
Terigu	375,4	8,1	56,7	20,7
Subtotal Padi-padian	1.280,90	29,7	317,6	115,9
2. Umbi-umbian				
Singkong	22	0,2	18,2	6,7
Ubi Jalar	5,3	0	4,1	1,5
Kentang	6,8	0,2	13,1	4,8
Sagu	0,4	0	0,1	0
Umbi Lainnya	0,3	0	0,3	0,1
Subtotal Umbi-umbian	34,9	0,5	35,8	13,1
3. Pangan Hewani				
Daging Ruminansia	72	5	17,3	6,3
Daging Unggas	92,9	6,6	30,4	11,1

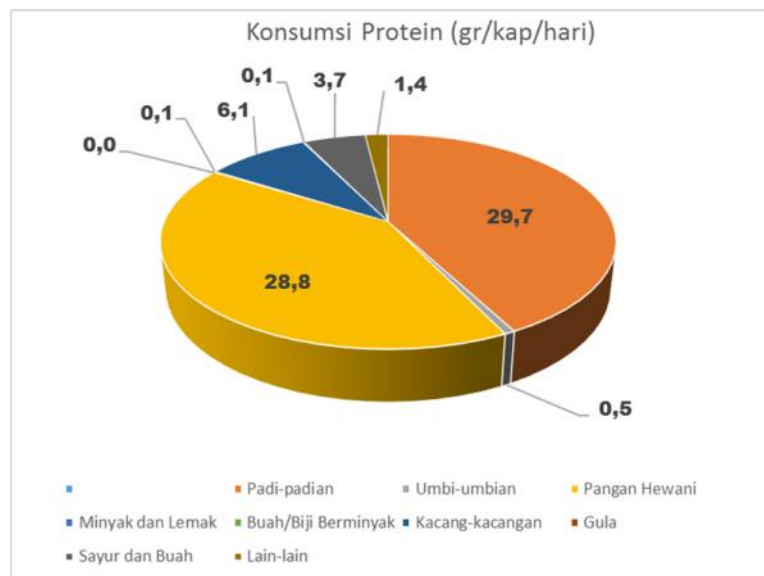
Telur	34	2,7	24,6	9
Susu	60,1	2,4	17,8	6,5
Ikan	76,2	12,1	64,7	23,6
Subtotal Pangan Hewani	335,2	28,8	154,8	56,5
4. Minyak dan Lemak				
Minyak Kelapa	16,8	0	1,9	0,7
Minyak Lainnya	221,5	-	24,6	9
Margarin	12,6	0	1,5	0,6
Subtotal Minyak dan Lemak	250,9	0	28	10,2
5. Buah/Biji Berminyak				
Kelapa	5,7	0,1	1,1	0,4
Kemiri	2,5	0,1	0,4	0,1
Subtotal Buah/Biji Berminyak	8,2	0,1	1,5	0,5
6. Kacang-kacangan				
Kacang Kedelai	53,9	5,5	29,9	10,9
Kacang Tanah	3,8	0,2	0,8	0,3
Kacang Hijau	4,9	0,4	2,7	1
Kacang lain	1	0,1	0,3	0,1
Subtotal Kacang-kacangan	63,6	6,1	33,7	12,3
7. Gula				
Gula Pasir	49,2	0	13	4,8
Gula Merah	3,6	0	1	0,4
Subtotal Gula	52,8	0,1	14	5,1
8. Sayur dan Buah				
Sayur	60,7	3,1	143,6	52,4
Buah	48,1	0,6	104,6	38,2
Subtotal Sayur dan Buah	108,8	3,7	248,3	90,6
9. Lain-lain				
Minuman	52,2	1,2	138,4	50,5
Bumbu	5,1	0,2	6,6	2,4
Subtotal Lain-lain	57,3	1,4	145	52,9

Makanan sumber vitamin dan mineral yaitu sayur-sayuran dan buah- buahan, dari Tabel 4 terlihat masih memberikan kontribusi energy yang rendah yaitu sebesar 108,8 Kkal/kap/th setara 248,3 gr/kap/th jika dibandingkan dengan angka anjuran (tabel 2) 126 Kkal/kap/th atau setara 263 gr/kap/th. Oleh karena itu Program Gerakan Makan Sayur dan Buah-buahan yang selama ini sudah berjalan perlu lebih ditingkatkan

Sedangkan makanan sumber lemak yaitu minyak lainnya (minyak sawit) memberikan kontribusi energy sebesar 250,9 Kkal/kap/hr. Nilai ini tertinggi urutan ke tiga dari jenis komoditas yang memberikan sumbangan energy setelah beras, dan terigu. Hal ini mengindikasikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi DKI banyak melibatkan minyak sawit (digoreng).



Gambar 1. Tingkat Konsumsi Energi per Kelompok Pangan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2019



Gambar 2. Tingkat Konsumsi Protein per Kelompok Pangan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis justifikasi konsumsi pangan, Skor PPH Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 adalah 88,2. Angka ini masih jauh dari nilai PPH yang menjadi indikator Standar Penilaian Minimal (SPM) yaitu lebih besar atau sama dengan 90 (90). Ini mengindikasikan bahwa pola makanan penduduk Provinsi DKI Jakarta masih belum beragam

Menurut deptan (2001) komposisi ideal pola konsumsi energi masyarakat tersusun dari 50% dari kelompok padi-padian, 6% dari kelompok umbi-umbian, 12 % dari kelompok pangan hewani, 10% dari kelompok minyak dan lemak, 3% biji berminyak, 5 % dari kelompok kacang-kacangan, 5% dari kelompok gula dan

6 % dari sayur dan buah seperti yang tercantum pada Tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7. Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (AKE 2100 Kkal/kap/hr, AKP 57 gr/kap/hr)

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	317,6	1.281	58,4	61,0	0,5	29,2	30,5	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	35,8	35	1,6	1,7	0,5	0,8	0,8	2,5	0,8
3	Pangan Hewani	154,8	335	15,3	16,0	2,0	30,6	31,9	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	28,0	251	11,4	11,9	0,5	5,7	6,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,5	8	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	33,7	64	2,9	3,0	2,0	5,8	6,1	10,0	6,1
7	Gula	14,0	53	2,4	2,5	0,5	1,2	1,3	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	248,3	109	5,0	5,2	5,0	24,8	25,9	30,0	25,9
9	Lain-lain	145,0	57	2,6	2,7	-	-	-	-	-
	Total		2.193	100,0	104,4		98,3	102,6	100,0	88,2

Tabel 3.8 menggambarkan proyeksi nilai komposisi PPH untuk tahun 2016- 2019 dengan perhitungan tahun dasar 2015 yang dibandingkan nilai PPH ditahun yang bersangkutan. Dari tabel 6 diketahui untuk kelompok padi-padian, hanya di tahun 2017 yang nilainya sedikit dibawah dari nilai target. Ini berarti kelompok pangan jenis padi-padian sudah memenuhi angka ideal.

Tabel 3.8. Perbandingan skor PPH sasaran di tahun 2015 dengan skor PPH aktual ditahun bersangkutan

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Aktual	2016		2017		2018		2019	
		2015	sasaran	realisasi	sasaran	realisasi	sasaran	realisas i	sasaran	realisasi
1	Padi-padian	24,7	24,8	25,0	24,8	24,2	24,8	25,0	24,8	25,0
2	Umbi-umbian	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	0,9	1,2	0,8
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,5	0,2
6	Kacang-kacangan	5,1	5,4	5,6	5,8	6,1	6,1	6,1	6,4	6,1
7	Gula	1,5	1,6	1,9	1,6	1,6	1,7	1,4	1,8	1,3
8	Sayur dan Buah	20,6	21,3	21,2	21,9	19,4	22,5	26,5	23,1	25,9
9	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	82,0	83,2	83,7	84,4	81,6	85,6	89,1	86,8	88,2

Selanjutnya, untuk kelompok umbi-umbian tahun 2016 dan 2017 memiliki nilai yang

melebihi dari angka sasaran sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 angkanya berada dibawah nilai sasaran, artinya pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan konsumsi umbi-umbian dan belum memenuhi angka ideal/anjuran.

Untuk kelompok pangan hewani dan kelompok pangan minyak dan lemak nilainya sama dengan target sepanjang tahun. Ini berarti untuk kelompok pangan hewani dan minyak dan lemak sudah memenuhi angka ideal.

Untuk kelompok buah/biji berminyak dan gula memiliki nilai yang di bawah target, namun nilai ini dianggap telah sesuai meskipun nilainya masih dibawah nilai ideal, mengingat gula menghasilkan energi yang tinggi yaitu 386,7 kkal/100 gr, sehingga jika dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menyebabkan kelebihan energi sehingga menjadi obesitas.

Untuk kelompok sayur dan buah terlihat ada kecendrungan terjadi peningkatan nilainya namun masih jauh dari nilai ideal/anjuran Widyakarya Pangan XI 2018 yaitu sebesar 30.

Analisis data Susenas dapat dimanfaatkan untuk perencanaan konsumsi pangan penduduk dalam rangka mencapai skore ideal yaitu mendekati 100. Perencanaan kebutuhan pangan diawal dengan penetapan sasaran skor PPH 2020-2024. Tabel 3.9 menggambarkan proyeksi skor PPH dari tahun 2019-2024 dengan menggunakan PPH 2019 sebagai tahun dasar.

Tabel 3.9. Sasaran Skor PPH Provinsi DKI Jakarta 2019-2024

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	2,5
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	1,0
6	Kacang-kacangan	6,1	6,4	6,8	7,1	7,5	7,9	10,0
7	Gula	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,5
8	Sayur dan Buah	25,9	26,3	26,6	27,0	27,4	27,8	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	Skor PPH	88,2	89,3	90,4	91,4	92,5	93,6	100,0

Dari tabel 3.9, terlihat bahwa untuk mencapai skore PPH 93,6 di tahun 2024 dengan tujuan agar pola konsumsi penduduk DKI lebih beragam, bergizi dan seimbang perlu:

- ✓ menurunkan konsumsi pangan kelompok padi-padian sebesar 8,2% dari nilai konsumsi di tahun 2019, khususnya beras dan terigu.
- ✓ meningkatkan konsumsi umbi-umbian sebesar 118,3% dari nilai konsumsi ditahun 2019
- ✓ mengurangi konsumsi pangan kelompok pangan hewani sebesar 11,2% dari konsumsi tahun 2019,
- ✓ mengurangi konsumsi pangan kelompok minyak dan lemak sebesar 6,9% dari konsumsi tahun 2019 terutama minyak sawit (minyak goreng)
- ✓ meningkatkan konsumsi biji/buah berminyak sebanyak 3x besarnya konsumsi di tahun 2019. Namun karena unsur utama buah/biji berminya adalah kemiri dan kelapa yang nota bene digunakan sangat terbatas pada menu sehingga peningkatannya tidak perlu terlalu tinggi.
- ✓ meningkatkan konsumsi pangan kelompok kacang-kacangan sebesar 30% dari nilai konsumsi tahun 2019
- ✓ meningkatkan konsumsi pangan kelompok gula sebesar 45% dari nilai konsumsi tahun 2019, namun mengingat konsumsi gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan maka sebaiknya angka konsumsi gula tidak perlu dinaikkan.
- ✓ meningkatkan konsumsi pangan kelompok sayur dan buah sebesar 7,2% dari nilai konsumsi tahun 2019, namun mengingat sayur dan buah merupakan sumber vitamin, mineral dan serat yang memang sangat dibutuhkan tubuh maka konsumsi sayur dan buah dapat lebih ditingkatkan sampai 10-12% .

Dari pembahasan Situasi Konsumsi Penduduk Povinsi DKI Jakarta yang telah dijabarkan terdahulu maka perlu dirancang strategi dan langkah implementasi dalam meningkatkan skor PPH Provinsi DKI Jakarta. Dibawah ini dijabarkan strategi dan implementasi kebijakan/Program yang memungkinkan dapat dipertahankan, dan atau dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

- a. Program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "masyarakat tertentu " adalah terdiri dari (1) Penerima Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus); (2) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali Upah Minimum Provinsi (UMP); (3) Penghuni yang

tinggal di rumah susun yang di kelola oleh Pemerintah Daerah; (4) Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (5) Masyarakat Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (6) Pekerja/buruh dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja; (7) Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan (7) Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP. Masyarakat tertentu ini mendapat akses untuk membeli pangan tertentu dengan harga murah seperti (a) beras Rp. 30.000,- per 5 kg; (b) telur ayam ras Rp. 10.000,- per tray atau setara dengan 1 kg; (c) Susu UHT 200 ml Rp. 30.000,- per karton atau isi 24 buah; (d) Ikan Beku Rp. 13.000,- per pak atau setara dengan 1 kg dan daging sapi 1 kg/bungkus seharga Rp. 35.000,- .

Program ini sebenarnya sangat mendukung terwujudnya PPH ideal, namun jika kita merujuk pada nilai konsumsi jenis pangan hewani, pola konsumsi penduduk DKI untuk jenis pangan hewani sudah sejak tahun 2016 melampaui nilai skor maksimal yang dianjurkan Widyakarya Pangan Nasional XI 2018 yaitu 24. Sehingga akan lebih tepat jika produk yang disubsidi tidak semua merupakan sumber protein hewani tetapi juga jenis pangan lain seperti kacang-kacangan, sayur dan buah, umbi-umbian. Dengan adanya intervensi dalam mengkonsumsi kacang-kacangan, sayur dan buah atau umbi-umbian selain terwujudnya pola konsumsi pangan bergizi juga terwujud keseimbangan, dan keberagaman pangan.

Program subsidi lain seperti Pasar Murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional perlu tetap dipertahankan dan jika memungkinkan subsidi tidak saja pada beras tetapi juga pada jenis sembako lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998.

- b. Pertanian Perkotaan atau urban farming bukanlah hal yang baru terutama di kota-kota yang terkendala pada keterbatasan lahan, penyinaran matahari, juga ketersediaan media berupa tanah dan air untuk bercocok tanam. Namun dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam bidang pertanian, hal tersebut ternyata bisa teratasi. Misalnya dengan melakukan pertanian vertikal, hidroponik, atau aquaponik. Melalui Program Pertanian Perkotaan diharapkan (1) terjadinya perluasan ruang terbuka hijau, sehingga meningkatkan kualitas udara dan menurunkan suhu

udara (2) mendapatkan akses pemenuhan konsumsi pangan baik untuk keluarga sendiri ataupun diperjualbelikan, (3) menjadi sumber pendapatan. Sebenarnya program-program sejenis sudah sejak lama dikembangkan di Jakarta seperti KRPL, Cabenisasi, Kebun Bibit, Green House dan program pertanian yang melibatkan dana CSR perusahaan nasional.

Namun yang menjadi perhatian adalah sustainability program-program tersebut. Di Provinsi DKI, program-program tersebut disinyalir kurang berhasil bila dibandingkan dengan keberhasilan Provinsi lain. Hal ini diduga karena masyarakat DKI yang menjadi pelaku dari program tersebut bukanlah “petani sejati”, sehingga perlu dimotivasi terus menerus dan dilakukan pendampingan secara intensif dari penyuluh pertanian.

- c. Sosialisasi dan Promosi Program Diversifikasi Pangan dan Konsep Pola makan B2SA yang dikembangkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan perlu didukung di tingkat provinsi dan wilayah. dengan melakukan tindakan nyata misalnya semua snack pertemuan-pertemuan di SKPD haruslah menerapkan pola menu B2SA Konsep pola makan beragam Bergizi Seimbang Aman dan Halal (B2SAH) perlu dikenalkan sedini mungkin pada generasi muda. Salah satu cara memperkenalkan Konsep Pola makan B2SA yaitu dengan memasukkannya ke dalam Kurikulum Sekolah, sehingga Konsep B2SA lebih terpola dalam benak generasi muda terutama anak sekolah

Pelaksanaan perhitungan Skor Pola Pangan Harapan tidak menggunakan anggaran APBD.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 3 (Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi)

Capaian Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi diperoleh melalui :

- a. Tahun 2018 telah dilakukan transplantasi karang sebanyak 2000 unit setara dengan 0,4 Ha
- b. Tahun 2019 telah dilakukan transplantasi karang sebanyak 3500 unit setara 0,7 Ha dan fish shelter sebanyak 100 unit setara dengan 1 Ha (total 1,7 Ha)
- c. Tahun 2020 Penanaman bibit terumbu karang di area kebun bibit PBKL di perairan Pulau Tidung Kecil sebanyak 11.750 fragmen setara dengan 0,587 ha

- d. Tahun 2020 Tambal sulam terumbu karang di area Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) Pulau Tidung sebanyak 2000 bibit karang atau setara dengan 0,1 ha

Tabel 3.10 Capaian Indikator Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi

NO	Target Pertahunnya	Kegiatan	2017	2018		2019		2020	
			target awal	target	capaian	target	capaian	target	capaian
1	0,7 Ha	melakukan rehabilitasi terumbu karang melalui transplantasi(penca ngkokan),pembibitan karang, dan tambal sulam karang (menggantikarang yang rusak dengan yang bagus).	140,9	140,9	141,3	141,6	142,00	141,8	142
2	0,5 Ha	Peneggelaman beton bertulang bentuk kubus (fish shelter) padakawasan konservasi dengan kedalaman ± 20 meter	140,9	140,9	140,9	141,4	141,90	141,5	141,9
		Pembibitan dan Penanaman terumbu karang diarea Kebun bibit karang Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (PBKL) Kepulauan seribu							0,587
3		Tambal sulam terumbu karang di Area DPL-Bm Pulau Tidung (oleh Kelompok DPL-BM)							0,1
		Capaian RPJMD Konservasi		140,9	141,3	142,1	143,00	142,4	143,687

Keberhasilan capaian Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi tidak terlepas dari peran serta masyarakat Kepulauan Seribu untuk terus mendukung pelestarian laut dan kawasan pesisir.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi APBDP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO.	Rincian	APBD (Rp.)	APBD P (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)	208.867.960.000	129.660.002.929	115.869.693.279	89,36
2	Belanja Langsung (BL)	382.755.668.053	111.347.366.703	100.213.317.933	90,00
TOTAL		591.623.628.053	241.007.369.632	216.083.011.212	89,66

Sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung per program sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi anggaran belanja langsung per program

No	Program	APBD		APBDP		Realisasi	%
		Jml keg	Anggaran (Rp.)	Jml keg	Anggaran (Rp.)		
1	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	14	45.093.764.405	4	497.198.000	449.550.400	90,42
2	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	45	154.143.103.306	9	3.495.938.705	3.321.117.124	95,00
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan	6	392.503.589	4	148.266.900	146.562.200	98,85
4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	26	2.256.140.261	21	1.012.945.666	991.537.005	97,89
5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	3	279.484.545	2	42.288.180	38.192.600	90,32
6	Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan	64	30.170.700.865	5	1.734.852.545	1.430.025.599	82,43
7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan	24	17.238.498.976	15	13.804.870.772	13.235.960.634	95,88
8	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	106	75.854.944.119	71	67.795.949.333	58.313.022.848	86,01

9	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	13	22.449.477.479	7	9.977.424.513	9.806.051.470	98,28
10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	44	34.877.050.508	19	12.837.632.089	12.481.298.053	97,22
Total		345	382.755.668.053	157	111.347.366.703	100.213.317.933	90,00

Realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 dilaksanakan tanpa anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2019 merupakan Tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 2 (dua) sasaran program dengan 3 indikator kinerja, semua indikator sudah mencapai target dengan kriteria capaian sangat baik.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia (SDM), anggaran dan sarana prasarana.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan permasalahan dan alternatif solusi sebagaimana diuraikan pada Bab III serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I

Realisasi Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Capaian	Realisasi	Interpretasi
				Tahun 2020	Tahun 2020	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	100	100	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	%	95	99.95	Sangat tinggi
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	83	88,2	Sangat tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	Sangat tinggi
5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	Sangat tinggi
6	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	4.434	4.435,72	Sangat tinggi
7	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan tangkap	ton	152.430	143.748,65	Sedang
8	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Hias	Ekor	21.335.576	23.465.935	Sangat tinggi
9	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	84.998.143	96.175.417	Sangat tinggi
10	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	6.379	23.611	Sangat tinggi
11	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	39	46,9	Sangat tinggi
12	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	Sangat tinggi

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Capaian	Realisasi	Interpretasi
				Tahun 2020	Tahun 2020	
13	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	Sangat tinggi
14	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelangaran	73	73	Sangat tinggi
15	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Ha.	142,4	143,687	Sangat tinggi
16	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi benih padi	Ton	47	47,251	Sangat tinggi
17	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	kasus	8	8	Sangat tinggi
18	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi Tanaman produktif	Bibit	36.700	40.000	Sangat tinggi
19	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton	38.022	45.202,20	Sangat tinggi
20	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian	ton	115	190,7	Sangat tinggi
21	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan	Lokasi	10	10	Sangat tinggi
22	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian	kasus	4	0	Sangat tinggi
23	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi susu	liter	5.300.306	80.383.327	Sangat tinggi

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Capaian	Realisasi	Interpretasi
				Tahun 2020	Tahun 2020	
24	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi daging	kg	34.440.014	47.511.864	Sangat tinggi
25	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan	ton	12.000	4.775	Sangat tinggi
26	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	kasus	0	0	Sangat tinggi
27	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax)	kasus	10	2	Sangat tinggi
28	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	ekor	9.500	17.420	Sangat tinggi
29	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias	rupiah	107.000.000.000	67.893.869.300	Sangat tinggi
30	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	Sangat tinggi
31	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	Sangat tinggi

Sumber : DKPKP(* data sementara)

Lampiran II

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

